

Editorial: **Globalization, Human Security and The Value of Education**

Editorial: **Globalisasi, Keamanan Manusia dan Peran Pendidikan**

Dias Pabyantara Swandita Mahayasa, Arum Tri Utami

Konsep keamanan dalam globalisasi bergeser dari perspektif *state centris* menuju ke arah human security. Argumen ini setidaknya didasarkan pada definisi konsep globalisasi yang menyebutkan beberapa hal terkait menguatnya interkoneksi antar masyarakat karena perkembangan teknologi informasi (Petras 2003). Dalam pendekatan yang sama, Martin Albrow (1990) menjelaskan fenomena globalisasi sebagai suatu keadaan ketika masyarakat dunia tergabung menjadi satu komunitas yaitu komunitas global. Kemudian Khor (1995) menyebutkan bahwa *Globalization is what we in the Third world have for several centuries called colonization*. Lebih kompleks lagi Baylis dan Smith (2001) menjelaskan interpretasi globalisasi sebagai suatu penguatan interaksi antar kelompok masyarakat sehingga kejadian-kejadian di belahan suatu belahan dunia bisa memberi efek yang maksimal pada belahan dunia lain. Pergeseran tersebut membuat dimensi keamanan semakin meluas, tidak hanya terbatas pada *hard politics*, namun lebih banyak mengenai *low politics*. Tulisan ini menjelaskan bahwa globalisasi menggeser kontur keamanan dengan memunculkan persepsi ancaman yang lebih variatif dan juga pergeseran bentuk perang dari *real war* menuju *virtual war*.

Redefinisi Keamanan

Interkoneksi yang semakin menguat antar masyarakat di dunia kemudian meredefinisi paradigma terkait keamanan. Menurut Castell (1996) motor penggerak utama dari globalisasi adalah perkembangan teknologi

informasi yang kemudian membentuk struktur masyarakat global yang terkoneksi. Konektivitas masyarakat global memaksa paradigma keamanan untuk berkembang, dari *state centric* menuju *human security*. Hal ini disebabkan karena proses interaksi antar masyarakat tidak lagi terjadi hanya melalui perantara negara, namun juga dalam hubungan personal. Sebelum berakhirnya Perang Dingin, interaksi antar masyarakat lintas negara terbatas pada apa yang representasi negara katakan dan lakukan, namun dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi sosial tidak lagi terikat pada negara. Dalam penjelasan Kaldor (2006, 73) bahwa globalisasi merubah struktur interaksi masyarakat menjadi interaksi yang sifatnya horizontal dalam konteks sosio-ekonomi.

Model interaksi yang sifatnya sosio-ekonomi kemudian memunculkan isu-isu baru dalam persepsi keamanan. Kondisi aman yang sebelum Perang Dingin dipersepsi sebagai kondisi ketiadaan perang, kemudian tergeser oleh isu-isu seperti isu lingkungan, upah pegawai, stabilitas keuangan yang sifatnya lebih *low politics*. Scholte (2000, 28) berargumen "Today notions of security in world politics tend also to encompass guarantee of ecological integrity, subsistence, financial stability, employment, cultural identity, social cohesion and knowledge."

Dalam era globalisasi dalam konteks interkoneksi, aspek-aspek yang disebutkan Scholte menjadi isu yang penting dalam security dan seringkali saling terkait satu dengan yang lainnya. Duffield (2001, 188) menyampaikan "War and peace are characterised by high levels of unemployment and underemployment." Sebagai contoh dalam konteks interkoneksi ekonomi, ketika terjadi Yunani 2010 negara-negara dalam Uni Eropa merasa tidak aman dengan kondisi krisis Yunani. Kemudian diberikan bantuan kepada Yunani dalam bentuk pinjaman moneter. Terintegrasinya mata uang Yunani dan Uni Eropa membuat aspek *financial stability* menjadi dimensi penting dari security. Hal ini disebabkan oleh pengaruh krisis Yunani ditengah masyarakat Uni Eropa yang terintegrasi sangat signifikan. Terlepas dari bantuan ekonomi yang diberikan, krisis Yunani memberi ancaman serius terhadap *human safety* di Uni Eropa (rieas.gr 2014). Ketika terjadi krisis Yunani, terjadi penurunan *social security standar* yang harus dipenuhi oleh warga yang tinggal di Yunani. Hal ini kemudian memicu imigran yang ada di negara-negara dengan *social security*

tinggi seperti Inggris dan Turki mulai bermigrasi ke Yunani (rieas.gr 2014). Data statistik dari rieas.gr (2014) menunjukkan migrasi penduduk menuju Yunani terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Jika kondisi ini dibiarkan di tengah masyarakat yang terintegrasi seperti Uni Eropa maka dampak krisis Yunani dan juga migrasi menuju Yunani menjadi sangat signifikan terhadap negara-negara di sekitarnya. Karena jika Yunani mengalami kehancuran ekonomi maka mata uang Euro akan mengalami permasalahan signifikan. Kasus Yunani membuktikan bahwa urusan sosio-ekonomi domestik suatu negara dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara lain.

Contoh lain dari segi kultur adalah penetrasi makanan barat terhadap kultur konsumtif masyarakat dunia. Dari segi kultur hal ini bermasalah karena menyebabkan mayoritas penduduk dunia mengalami obesitas (Laurance 2011). Obesitas ada dalam setiap kultur masyarakat di berbagai negara, Nauru menempati posisi pertama masyarakat penderita obesitas sebesar 95% dari total populasi, kemudian Micronesia, Cook Islands, Tonga: all at 92 % Niue: 84 %, Samoa: 83 %, Palau: 81 %, United States: 79 %, Kiribati: 77 %, Dominica: 76 %, Kuwait: 75 %, Argentina: 75 %, Mexico: 73 %, Australia: 71 %, Egypt: 70 %, Greece: 70 %, Belarus: 67 % and United Kingdom: 66 % (Stone, 2010).

Kondisi ini menyebabkan ancaman terhadap keamanan populasi dunia, karena mayoritas penderita obesitas di dunia adalah orang pada usia produktif (Laurence 2011). Ancaman ini hanya mungkin terjadi ketika masyarakat ada dalam kondisi yang terintegrasi. Terintegrasi dalam artian terkoneksi secara kultur, informasi, ekonomi dan politik. Globalisasi menyediakan sarana dan kondisi yang memungkinkan terjadinya masyarakat terintegrasi. Dengan menciptakan masyarakat terintegrasi, globalisasi memposisikan masyarakat dunia sebagai satu kesatuan (Castell 1996). Dari sini kemudian dapat diasumsikan bahwa masyarakat global sebagai satu kesatuan sangat potensial berhadapan dengan potensi ancaman yang sifatnya lokal, namun berkembang kearah global, seperti dicontohkan kasus Yunani dan obesitas sebelumnya. Potensi ancaman lokal yang mengglobal ada dalam paradigma keamanan non tradisional yang difasilitasi oleh proses globalisasi.

Pergeseran Konsep Perang

Munculnya elemen-elemen *human security* sebagai konsideran penting dalam era globalisasi memunculkan konsekuensi baru, yaitu pergeseran bentuk dari apa yang disebut terkait erat dengan security, yaitu perang. Definisi klasik perang menurut Clausewitz (dalam Gatzke 1942) adalah *organized violence*. Pada zaman setidaknya sampai berakhirnya Perang Dunia kedua tahun 1945 definisi perang dalam sisi teoritik maupun praktik disepakati menjadi perang fisik dengan menyertakan unsur *violence*.

Namun ketika berakhirnya perang dingin, sekaligus masa ketika teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat sehingga menyebabkan masyarakat terintegrasi, tidak banyak ditemui adanya perang secara fisik dengan melibatkan unsur *violence*. Hal ini disebabkan karena dalam era globalisasi, aspek ekonomi lebih mendominasi hubungan antar negara (Paul t.t., 3). Hubungan ekonomi dalam kaitan ini dibingkai dalam fenomena transnasionalisasi perusahaan multinasional. Berkembangnya model perusahaan transnasional memaksa negara untuk menggaransi keamanan dalam negaranya (Paul t.t., 3).

Terintegrasinya masyarakat dunia dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat perang mengalami redefinisi. Perubahan format perang dari *real war* (Ripsman & Paul 2005) menuju *virtual war* membawa konsekuensi perubahan mendasar terhadap cara, alat, aktor dan sebab dari perang. Dalam *virtual war* perang tidak harus dilakukan melalui pertemuan fisik, melainkan dapat dilakukan melalui dunia maya. Tidak perlu adanya kontak senjata namun saling serang antar wacana. Virtual dapat berupa hacking, saling lempar wacana di berbagai media dan serangan virus yang mematikan jaringan komunikasi dan informasi (Ignatieff 2000).

Munculnya bentuk baru dari perang membuat alat yang digunakan untuk melakukan serangan terhadap lawan juga mengalami perkembangan. Ditengah masyarakat yang terintegrasi secara komunikasi dan informasi instrumen militer tidak lagi dianggap efektif untuk menyerang lawan, karena biaya yang tinggi dan mobilisasi yang sulit, sehingga banyak negara melakukan pemotongan anggaran militer pasca perang dingin (Ripsman & Paul 2005). Sebaliknya, media menjadi alat perang yang signifikan, murah dan berdampak luas terhadap masyarakat. Fungsi pembentukan wacana oleh media adalah alat

konfrontasi yang potensial dalam masyarakat terintegrasi. Taylor (1997) mengatakan "God made people read so that I could fill their brains with facts, facts, facts-and later tell them whom to love, whom to hate and what to think." Sebagai contoh ketika muncul karikatur Nabi Muhammad di majalah *Jyllands-Posten* Denmark, umat Islam di seluruh dunia menunjukkan respon protes yang sama (Hansen 2011, 53). Terlepas dari penjelasan mengenai kemunculan fenomena tersebut yang menarik adalah bagaimana efek yang dihasilkan oleh gambar di satu media massa terhadap respon negara-negara. Terjadi protes yang disertai kekerasan di Perancis dan Jerman sebagai bentuk resistensi dari karikatur tersebut. Protes tersebut menyebabkan masyarakat yang memprotes maupun yang terkena dampak dari gelombang protes merasakan kondisi tidak aman akibat dari wacana yang dimuat di media. Globalisasi menghasilkan masyarakat yang terkoneksi dan memfasilitasi terjadi insecurity seperti dijelaskan sebelumnya.

Setelah membahas bentuk, cara, dan aktor dalam perang, dimensi perang yang mengalami pergeseran adalah dimensi power. Dalam paradigma perang klasik, power adalah kekuatan senjata dan pasukan dari pihak-pihak yang berkonflik. Namun dalam paradigma globalisasi, power adalah network (Dicken 2007). Proposisi perang dalam paradigma klasik adalah siapa mempunyai pasukan dan senjata makin banyak maka dia akan menjadi pemenang. Namun dalam masyarakat yang terintegrasi dalam globalisasi, siapa yang mempunyai network paling luas dia akan menjadi pemenang. Contoh paling sederhana dari proposisi ini adalah rivalitas perekonomian Cina dan Amerika Serikat. China muncul sebagai kekuatan baru menyaingi Amerika Serikat karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini dikarenakan China unggul dalam *network* sehingga pangsa pasar produk perdagangan Cina mencakup berbagai negara di dunia, selain diaspora Cina yang kemudian membentuk formasi power bagi Cina (Dicken 2007). Dalam konteks ini China dianggap sebagai *raising power* dalam konteks geopolitik dunia karena kemajuan perdagangannya, sehingga sering dianggap sedikit menggeser dominasi perekonomian Amerika Serikat. Di titik ini globalisasi kemudian memunculkan indikator baru dalam menentukan konstelasi global yaitu berdasarkan peta perekonomian. Sebagaimana disebutkan Dicken (2007) bahwa *old geographies of production, distribution and consumption are continuously being disrupted and that new*

geographies are continuously being created. Ini kemudian menegaskan formasi geopolitik yang ada dan akan terbentuk tidak dapat dilepaskan dari tinjauan aspek produksi dan distribusi sebagai indikatornya.

Lebih lanjut Dicken (2007) menjelaskan mengenai konstelasi dunia yang kemudian membentuk model *global shift*, yang menguatkan produksi, *trade* dan *direct investment* sebagai indikator. Berdasarkan tiga indikator dari tersebut, Dicken (2007) mengasumsikan bahwa Amerika Serikat masih menjadi aktor dominan dalam ekonomi global. Disini penulis sedikit berbeda dengan Dicken. Bahwa terminologi menguasai perekonomian global harus dimaknai dengan lebih kritis. Dalam statistika perekonomian Amerika Serikat memang dominan, misalnya dalam FDI dan distribusi, namun dalam realitanya barang-barang China lebih banyak dijumpai di pasaran global. Jika merujuk pada hitungan matematis, memang nilai produksi dan distribusi China kalah dengan Amerika, tapi yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa industri China banyak tersusun dari industri bajakan yang tidak terdaftar secara legal. Ini kemudian akan mempengaruhi hitungan statistik perekonomian China secara signifikan.

Globalisasi dan Krisis Ekonomi

Liberalisasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari globalisasi dianggap sebagai sebuah sistem yang paling menguntungkan untuk negara. Negara maju yang dianggap sebagai pusat peradaban dunia menjadi contoh dari berbagai negara berkembang untuk mendapatkan kesempatan dan kemajuan yang sama. Perdagangan bebas yang didasarkan pada prinsip globalisasi membuat peran negara menjadi semakin berkurang. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Liberalisme yang dibanggakan oleh negara barat, akhirnya mengalami ujian ketika Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menyebarkan liberalisme mengalami masalah keuangan pada tahun 2007 (Eichengreen, 12).

Krisis global 2008 ini menjadi salah satu krisis besar yang berdampak ke banyak negara. Krisis yang berawal dari Amerika Serikat ini cepat menyebar ke berbagai kawasan di dunia. Ada beberapa hal yang menyebabkan krisis ini terjadi. Pertama, adanya boom kredit atau yang lebih dikenal dengan ekspansi keuangan yang cepat. Adanya ledakan kredit diakibatkan oleh memburuknya standar pinjaman seperti yang terjadi pada pinjaman *subprime* di AS. Biasanya tidak langsung menyebabkan krisis tetapi dampaknya bisa meluas pada lembaga

keuangan lainnya sehingga membuat keuangan menjadi rentan. Kedua, meningkatnya harga aset dengan cepat. Harga aset berupa harga rumah di AS naik lebih dari 30% dari 2003 sampai dengan awal 2008. Ketiga, pembuatan instrumen baru yang mengandalkan ekonomi. Adanya liberalisasi keuangan dan deregulasi yang tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat membuat ekonomi menjadi rentan (Douglas, 11).

Krisis global yang terjadi di Amerika Serikat membutuhkan penanganan dari berbagai lembaga keuangan global (*global governance*). Krisis yang berusaha diselesaikan oleh berbagai lembaga keuangan belum mengalami hasil yang signifikan. Krisis ekonomi dan keuangan global tidak saja mempengaruhi kondisi perekonomian di negara maju, seperti Amerika Serikat atau negara-negara di kawasan Eropa, namun juga mulai berdampak kepada negara-negara kawasan lain di dunia, termasuk banyak negara di Asia. Krisis AS dan Eropa pada 2008-2009 sebagai puncak peristiwa yang mengubah konstelasi ekonomi global. Banyak negara sampai saat ini masih berkuat pada upaya pemulihan ekonominya masing-masing (Caporaso 109).

Krisis tersebut terus meluas sampai pada tahun 2012, terjadi krisis di kawasan euro. Krisis yang diawali dengan krisis Yunani, membuat perekonomian negara-negara eurozone mengalami permasalahan. Terlebih dengan adanya krisis global 2008 yang membuat kondisi di eurozone menjadi semakin parah, puncaknya terjadi krisis eurozone pada tahun 2012 (Baimbridge and Whyman 90).

Struktur *eurozone* yang lemah menjadi penyebab mudah menyebarnya krisis dan adanya masalah *free rider*. Dalam resesi yang terjadi tahun 2012, negara anggota *eurozone* tidak memiliki kebijakan moneter yang independen sehingga tidak dapat menetapkan tingkat suku bunga mereka sendiri untuk dapat menstabilkan perekonomian mereka. Krisis juga disebabkan oleh ketidakseimbangan daya saing. Krisis Yunani juga menjadi faktor pendorong besar lainnya timbulnya krisis *eurozone* tahun 2012. Negara anggota memiliki beban untuk membantu perekonomian Yunani dengan memberikan bantuan dana. Ekonomi Yunani menjadi sangat bergantung dengan negara *eurozone* lainnya (Douglas 115).

Berbagai krisis ini membutuhkan adanya penanganan bersama dari berbagai negara di dunia. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah adanya *global*

governance. G20 adalah salah satu forum yang dapat dianggap sebagai *global governance*, dimana berusaha untuk menangani berbagai krisis yang terjadi. Forum G20 adalah sebuah forum multilateral yang lahir dilatarbelakangi karena adanya krisis global. Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997 merupakan salah satu krisis global yang meluas ke negara-negara lain di dunia. Krisis finansial yang terjadi di beberapa negara membuat menteri keuangan negara maju berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengajak negara-negara yang perekonomiannya menguat (*emerging economies*) untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global.

G20 menjadi forum yang signifikan dalam penanganan krisis tahun 2008 karena dunia internasional menganggap bahwa apabila negara anggota G-20 melakukan kebijakan yang terkoordinir akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi dunia. Salah satu wujud nyata adalah negara anggota G-20 berkomitmen untuk memberikan \$500 miliar sebagai sebuah program *global reflation*. Langkah awal adalah program untuk mereformasi IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya yaitu berupa perjanjian untuk memperluas bantuan yang diberikan oleh IMF. Serta mendesak IMF dan Bank Dunia agar lebih representatif terhadap negara berkembang. Usulan lain dari G-20 adalah reformasi Bank Dunia dan IMF, yaitu agar suara dalam IMF dan Bank Dunia harus mendukung pembangunan yang ada di negara berkembang, yang ditandai dengan *Financial Stability Board* pada KTT London 2009. Tujuan dari FSB ini adalah koordinasi di tingkat global mengenai kebijakan finansial nasional dan penentuan standar untuk mempromosikan aturan yang efektif serta kebijakan pengawasan keuangan (Baimbridge and Whyman 56).

Globalisasi dan Pendidikan

Perkembangan globalisasi yang signifikan membawa banyak perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Selain berpengaruh terhadap perubahan konsep perang dan adanya krisis ekonomi. Globalisasi juga memiliki dampak signifikan dalam bidang pendidikan di seluruh dunia. Proses globalisasi juga mengubah makna dari *human security*. Perdana Menteri Obuchi Keizo menjelaskan bahwa *human security* adalah suatu keyakinan bahwa manusia harus mampu menjalani kehidupan kreativitas tanpa kelangsungan hidup mereka terancam atau martabat mereka terganggu. Sehingga dapat juga diartikan bahwa *human security*

adalah perlindungan dan pelestarian “kelangsungan hidup” manusia dan kehidupan sehari-hari (kematian dini, kesehatan, dan buta huruf). Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang penting untuk menunjang *human security* (Sen 82)

Pendidikan menjadi salah satu hal ada di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipenuhi untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap individu. Pembangunan yang kerap kali berhubungan dengan proses globalisasi sering kali tidak melihat pendidikan menjadi hal yang penting dan mendasar bagi kesejahteraan manusia. Padahal pendidikan merupakan tempat sentral dalam pembangunan manusia. Mahbub ul Haq, seorang ekonom dan pembuat kebijakan dari Pakistan, mengusulkan sebuah ide mengenai *Human Development Index* atau HDI. HDI adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur perkembangan sebuah negara berdasarkan beberapa indikator seperti pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi saja. Menurut Mahbub ul Haq, pembangunan harus diukur dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (Bajpai 197).

Mahbub ul Haq memberikan tempat utama pada melek huruf dan sekolah sebagai pusat perluasan kemampuan manusia dan sebagai hal yang tidak terpisahkan untuk melihat agregat pembangunan manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada masyarakatnya secara merata. Tidak hanya negara saja yang memiliki kewajiban, tetapi seluruh elemen negara memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan hak asasi manusia. Pendidikan dasar memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam dunia yang semakin mengglobal, dimana semakin banyak perusahaan dan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang baik maka dia akan lebih dapat bersaing dengan dunia kerja yang semakin mengglobal. Kurangnya pendidikan juga bisa menyebabkan rasa tidak aman bagi setiap manusia. Mereka akan merasa tidak percaya diri dengan dunia yang semakin kompleks (Sen 120).

Menurut Mahbub ul Haq, pendidikan adalah investasi utama dalam sumber daya manusia. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas merupakan

fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Konsekuensinya adalah ketika pendidikan merata dan dapat diakses oleh semua orang, maka angka kemiskinan juga akan semakin menurun. Pendidikan harus menjadi hak dasar bagi setiap individu tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi atau geografis. Negara harus memberikan akses yang setara dan kesempatan pendidikan kepada semua masyarakatnya terutama bagi kelompok yang rentan (Bajpai 197).

Dengan adanya globalisasi sebenarnya membawa beberapa perubahan yang positif seperti akses pendidikan yang lebih mudah bagi semua orang. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah melalui teknologi seperti *mobile phone* yang didalamnya terakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Dengan pemerataan dan kesempatan akses ini tentunya dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Peran pemerintah harus dominan untuk melakukan pemerataan akses pendidikan dan teknologi (Chipman 9).

Selain berbicara mengenai akses, globalisasi juga membawa pada berbagai budaya serta pandangan dunia yang beraneka ragam. Pendidikan multikultural menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan siswa untuk masuk ke dalam masyarakat yang multikultur. Kita bisa melihat bahwa siswa yang berasal dari negara lain bisa dengan mudah berada di berbagai sekolah di Indonesia. Mobilitas internasional yang menjadikan hal tersebut menjadi hal yang mungkin terjadi. Siswa yang berasal dari Indonesia bisa mencari peluang mendapatkan pendidikan dan bekerja di luar negeri. Perguruan tinggi di berbagai negara menerima siswa internasional. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi lebih beragam dari segi budaya dan intelektual (Chipman 10).

Proses internasionalisasi pendidikan dipicu oleh adanya arus globalisasi serta kepentingan politik. Sedangkan globalisasi pendidikan lebih kepada proses dimana penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menembus batas dari negara melalui berbagai bentuk kerjasama. Proses yang terjadi dalam globalisasi menjadi lebih kompleks, karena didalamnya melibatkan berbagai aktor baik negara maupun non negara. Sekarang ini ada banyak negara yang memberikan beasiswa yang ditujukan untuk negara berkembang. Beasiswa ini tentunya

merupakan kesempatan besar bagi generasi muda Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan di negara maju. Ketika generasi muda mendapatkan pendidikan di negara lain, diharapkan bisa kembali untuk memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia (Michael 130).

Pembahasan mengenai pendidikan dalam edisi ini dibahas pada artikel ketiga dan ketujuh. Artikel ketiga yang ditulis oleh Arauf Aji Harindra Sakti dari Waseda University mendiskusikan mengenai hubungan antara beasiswa pendidikan dengan kualitas pendidikan di Kamboja. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana pemberian beasiswa di Kamboja tidak serta merta berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan di negara tersebut. Kemudian artikel ketujuh yang ditulis oleh Diar Rizki Pusponugroho dari Universitas Jenderal Soedirman meneliti mengenai strategi yang dilakukan guru di SMP Negeri 3 Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam merespon sistem zonasi di pendidikan menengah.

Secara runut, edisi kali ini memuat tujuh artikel dengan artikel pertama menjelaskan mengenai pengaruh strategi Belt and Road Tiongkok terhadap Indonesia. Lebih jauh artikel ini juga menganalisis mengenai bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam merespon kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut. Tulisan ini ditulis secara kolaboratif oleh Ridha Amalia dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Mirah Satria Alamsyah dari Shandong University, China.

Artikel kedua ditulis oleh Winda Cahya Riyanti, Titis Perdani dan Khairu Roojiqien Sobandi dari Universitas Jenderal Soedirman. Artikel yang berjudul "Implementation of Public Services through SI PATAS Innovation Program in Banyumas Regency, Central Java Province" mendiskusikan mengenai bagaimana kebijakan publik dikaji dari sisi demokrasi digital. Artikel ini berargumen bahwa masyarakat tidak dapat menerima jenis pelayanan baru ini karena dianggap tidak menyelesaikan masalahnya.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Aris Sarjito dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Artikel yang berjudul "Challenges and Opportunities Facing Public Administration in the 21st Century" ini mendiskusikan mengenai bagaimana perubahan sosial politik menyediakan catatan serius terhadap praktik dan konsep administrasi publik. Temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa administrasi publik menghadapi tantangan seperti perubahan harapan

publik, kendala fiskal, gangguan teknologi, dan perubahan politik. Di sisi lain, ada juga peluang seperti peningkatan kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan warga.

Artikel selanjutnya berjudul “China-Russia Relations and the Crimea Crisis: Does China Still Insist on the Non-interference Principle?” ditulis oleh Dini Putri Saraswati dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berkolaborasi dengan Arnaldi Nasrum dari Groningen University. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana dinamika hubungan antara Tiongkok dengan Rusia dalam kaitannya dengan aneksasi terhadap Krimea. Temuan dari penelitian ini adalah kepentingan Tiongkok terhadap Rusia, yaitu kerja sama energi, militer, serta pengaruh di Asia Tengah sehingga timbul pragmatisme Tiongkok untuk mendukung Rusia.

Artikel terakhir berjudul “Instagram @Jakartabiennale Sebagai Media Promosi Dalam Pelaksanaan Exhibition Jakarta Biennale 2021 “ESOK” “ yang ditulis oleh Rimba Shafa Anindya, Wininda Qusnul Khotimah, Vilya Dwi Agustini dari Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka. Tulisan ini menyediakan analisis terhadap konten dari Instagram yang digunakan untuk mendukung promosi pariwisata.

Ketujuh artikel ini menjadi langkah awal kami di JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) untuk memulai langkah dan komitmen baru dalam penerbitan ide-ide ilmiah. Kedepan kami berharap JUSS dapat menjadi tempat sirkulasi gagasan untuk berkontribusi terhadap kemajuan kajian sosial politik di Indonesia dan dunia.

Hormat kami,

Dias P.S. Mahayasa & Arum Tri Utami
Editor

Daftar Pustaka

- Castells, Manuel. 1996. "The Culture of Real Virtuality: the Integration of Electronic Communication, the End of the Mass Audience, and the Rise of Interactive Networks, dalam *the Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell Publisher.
- Clausewitz, Carl Von. 1812. "On War", dalam Gatzke, Hans W. 1942. "Principles of War" [online] dalam <http://www.clausewitz.com/readings/Principles/>
- Dicken, Peter. 2007. "Questioning Globalization", dalam *Global Shift: Mapping the Changing Countours of the World Economy*, London: SAGE Publications.
- Duffield, Mark. 2001. "Non-Liberal Political Complexes and the New Wars", dalam *Global Governance and the New Wars*, London: Zed Books.
- Hansen, Lene. 2011. "Theorizing Image For Security Studies" [online] dalam <http://ejt.sagepub.com/content/17/1/51>.
- Hardt, Michael dan A. Negri. 2004. "Simplicissimus", dalam *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, New York: the Penguin Press.
- Ignatieff, Michael. 2000. "Virtual war", in *Virtual war: Kosovo and Beyond*, New York: Picador.
- Kaldor, Mary. 2006. "the Politics of New Wars", dalam *New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, Cambridge: Polity Press.
- Laurance, Jeremy. 2011. "How Tiny Nauru Became World's Fattest Nation," [online] dalam <http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/how-tiny-nauru-became-worlds-fattest-nation-2203835.html>
- Petras, James. 2003. "The Myth of the Third Scientific-Technological Revolution", dalam *The New Development Politics: the Age of Empire Building and New Social Movements*, Aldershot: Ashgate.
- RIEAS.gr. 2014. "Immigration to Greece," [online] dalam <http://www.rieas.gr/research-areas/illegal-immigration/2113-immigration-to-greece-february-2014.html>
- Ripsman, N.M. dan T.V. Paul. 2005. "Globalisation and the National Security State", *International Studies Review*, No. 7.
- Scholte, Jan Aart. 2000. "Globalization and (In) Security", dalam *Globalization: a Critical Introduction*, New York: Palgrave.
- Smith, Steve & Baylis, John (2001) "Introduction," in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.

Stone, Emily. 2010. "Fat and Fatter: The World's 10 Fattest Countries 2010," [online] dalam <http://www.globalpost.com/dispatch/health/101118/fat-and-fatter-worlds-10-fattest-countries>

Taylor, Philip M. 1997. "Brushfires and Firefighters: International Affairs and the News Media", dalam *Global Communications, International Affairs and the Media since 1945*, London: Routledge.